

**PENGARUH INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



PUJA SCUNDA PERMATA

NIM. 73940/06

PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

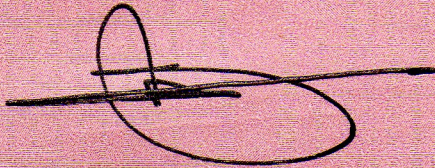
PENGARUH INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA BARAT

NAMA : PUJA SCUNDA PERMATA
BP/NIM : 2006/73940
KEAHLIAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Januari 2011

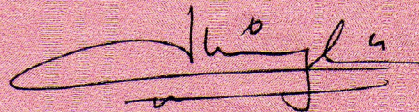
Disetujui Oleh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Syamsul Amar B, M.S
NIP : 19571021 198603 1 001

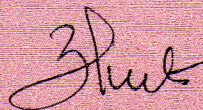
PEMBIMBING II



Dra. Mirna Tanjung, M.S
NIP : 19491215 197703 2 001

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP : 19610502 198501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Program
Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

PENGARUH INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA BARAT

NAMA : PUJA SCUNDA PERMATA
TM/NIM : 2006/73940
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Januari 2011

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. Syamsul Amar, B. MS,
2. Sekretaris : Dra. Mirna Tanjung, MS,
3. Anggota : Drs. Zul Azhar, M. Si,
4. Anggota : Dra. Armida S, M. Si

TANDA TANGAN

1.....
2.....
3.....
4.....

ABSTRAK

Puja Scunda Permata 2006/73940 : Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar B. M.S dan Pembimbing II Ibu Dra. Mirna Tanjung M. S.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Barat (3) pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif, variabel eksogen dalam penelitian ini adalah investasi (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (X_2), sedangkan variabel endogen adalah pendapatan asli daerah (Y). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan data time series dari tahun 1979-2008. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan induktif yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas dan analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (2) Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disarankan agar lebih bisa menarik para investor baik investor domestik maupun asing agar mau berinvestasi ke Indonesia, karena dengan banyaknya investasi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, pemerintah agar lebih meningkatkan PDRB dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menambah faktor-faktor ekonomis yang dapat meningkatkan PAD sendiri, serta diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti variabel-variabel di luar variabel yang telah penulis teliti.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan pada Allah SWT karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat”. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar B, M.S, selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Mirna Tanjung, M.S, selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Syamsul Amar, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S, dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen penguji skripsi yaitu Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si, dan ibu Dra. Armida S, M.Si.
4. Seluruh dosen, staf pengajar dan pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah banyak membantu penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Kepala Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN	
HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Konsep dan Teori PAD	11
2. Pertumbuhan Ekonomi	24
3. Investasi	26
4. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	30
5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap PAD	32
B. Kerangka Konseptual	36
C. Hipotesis	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis Data	39
D. Variabel Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Definisi Operasional	41
G. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran umum daerah penelitian	51
2. Analisis Deskriptif variabel penelitian.....	53
3. Uji prasyarat analisis.....	60
4. Analisis Jalur.....	62
5. Uji Hipotesis	69
B. Pembahasan.....	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel :	<i>Halaman</i>
1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat 1994-2008.....	4
2. Laju pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat 1994-2008	5
3. Perkembangan PAD di SumateraBarat	6
4. Deskriptif Variabel Investasi di Sumatera Barat tahun 1979-2008.....	52
5. Deskriptif Variabel Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat tahun 1979-2008	54
6. Deskriptif Variabel PAD di Sumatera Barat tahun 1979-2008	57
7. Hasil Uji Normalitas.....	59
8. Hasil Uji Homogenitas	59
9. Pengaruh variabel Investasi terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi	61
10. Koefisien Jalur pengaruh X1 dan X2 terhadap Y	62
11. Pengaruh langsung dan tidk langsung variabel penyebab, variabel perantara dan variabel akibat	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	<i>Halaman</i>
1. Kerangka Konseptual Analisis Jalur	32
2. Struktur pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y	42
3. Struktur pengaruh variabel X1 terhadap Y	43
4. Struktur pengaruh variabel X1 terhadap X2	43
5. Struktur pengaruh variabel X2 terhadap Y	44
6. Hasil analisis substruktur 1 (pengujian X1 terhadap X2)	62
7. Hasil analisis substruktur 2 (pengujian X1, X2 terhadap Y)	64
8. Struktur jalur hasil penelitian	71

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
1. Hasil Uji Normalitas.....	77
2. Hasil Uji Homogenitas	77
3. Hasil Analisis Jalur variabel X1 terhadap X2	79
4. Hasil Analisis Jalur X1 dan X2 terhadap Y	80
5. Tabel F.....	81
6. Tabel T	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurunnya perekonomian Indonesia pada saat ini yang gejalanya sudah terlihat sejak terpuruknya nilai Rupiah sebelum krisis moneter pertengahan tahun 1997 adalah akibat sentralisme kekuasaan termasuk sentralisme kekuasaan dalam membuat keputusan ekonomi. Dengan berbagai keputusan ekonomi yang terpusat melalui berbagai macam Inpres, Keppres dan Peraturan Pemerintah itu disedotlah berbagai macam hasil kekayaan alam dan pendapatan asli daerah terhadap pemerintah pusat. Hal itu terjadi di bawah kekuasaan rezim Orde Baru.

Pada pertengahan tahun 1998 dimulailah babak baru untuk menata kembali Indonesia dengan masa depan lebih baik. Sentralisme kekuasaan tidak lagi dilaksanakan baik dalam segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, maka selain dapat memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan dapat memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintahan pusat, maupun yang dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kebutuhan di daerah, maka peningkatan perolehan dari pajak dan retribusi harus ditingkatkan melalui upaya mengefisiensikan pemungutan

pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara atau daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan PDB atau PDRB dalam arti tercapainya tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dari produksi barang-barang dan jasa-jasa di berbagai sektor. Demikian juga halnya dengan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat melalui perkembangan pendapatan regional perkapita PDRB.

Pembangunan ekonomi nasional adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan memberntuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Hal ini dapat meningkatkan jumlah produksi sehingga dapat merangsang pendapatan pajak daerah sehingga meningkatkan PAD.

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang banyak memiliki potensi baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk dikembangkan di berbagai sektor terutama sektor pertanian banyak membuat para investor asing maupun investor domestik ingin menanamkan modalnya di Sumatera Barat dengan tujuan dapat mendapatkan profit. Pemerintah Sumatera Barat menyadari bahwa untuk dapat menggerakkan roda perekonomian sangat dibutuhkan investasi.

Sumatera Barat pun diuntungkan karena dapat menambah modal dalam mengembangkan sektor-sektor tersebut dengan penambahan faktor produksi di berbagai bidang.

Sumatera Barat sekarang ini sedang dalam proses pemulihan pasca gempa 30 September tahun lalu. Perekonomian Sumatera Barat ketika itu pun seperti berhenti, tidak ada aktifitas ekonomi yang terjadi. Banyak bangunan dan tempat pelayanan publik yang rusak maupun yang tidak bisa dipakai lagi khususnya di Kota Padang yang dekat dengan pusat gempa dan paling banyak mengalami kerusakan sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan menata kembali perekonomiannya. Perbaikan itupun membutuhkan banyak dana dan investasi. Investasi yang ditanamkan itu adalah pada sektor publik dan swasta, pada sektor publik contohnya adalah pada pembuatan dan perbaikan jembatan, jalan, sarana umum dan lain lain, sedangkan contoh penanaman investasi pada sektor swasta adalah seperti pembuatan tempat wisata, hotel, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

Peningkatan jumlah investasi yang diterima oleh pemerintah daerah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bisa dilihat dari peningkatan PDRB. Dan pembangunan sarana dan prasarana tersebut pada akhirnya akan menambah potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti bertambahnya penerimaan pajak dan retribusi dari adanya aktifitas pembangunan tersebut. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah daerah akan meningkatkan pertumbuhan PDRB sebagai bukti keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan pada gilirannya pertumbuhan PDRB akan berujung pada peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara umum dapat digunakan sebagai penggambaran bahwa

perekonomian Sumatera Barat telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran ataukah sebaliknya.

Berikut pada Tabel 1 ditampilkan data tentang PDRB dan laju pertumbuhan PDRB sebagai berikut:

Tabel 1
PDRB Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat tahun 1994-2008 berdasarkan Harga Konstan tahun 2000

Tahun	PDRB(dlm juta)	Pert Eko(%)
1994	18.839.597,08	-
1995	20.522.113,94	8.93
1996	22.137.732,37	7.87
1997	23.275.573,45	5.14
1998	21.698.532,08	-6.78
1999	22.043.156,83	1.59
2000	22.889.614,05	3.84
2001	23.727.373,93	3.66
2002	24.840.187,76	4.69
2003	26.146.781,63	5.26
2004	27.578.136,56	5.47
2005	29.159.480,57	5.73
2006	30.949.945,10	6.14
2007	32.912.968,59	6.34
2008	35.007.921,57	6.37

Sumber: Sumatera Barat dalam angka(berbagai edisi) BPS Sumatera Barat tahun 2010

Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 1995 terjadi pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi, yaitu sebesar 8,93%. Kemudian di tahun berikutnya yaitu tahun 1996, PDRB Sumatera Barat perlahan mengalami penurunan sebesar 7,87%. Penurunan pertumbuhan PDRB yang paling kecil dari rentangan tahun tersebut adalah pada tahun 1998, yang mengalami bernilai minus, yaitu sebesar -6,78%, yang dari tahun sebelumnya

yaitu tahun 1997 sebesar 5,14%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB 15 tahun tersebut adalah sebesar 4,59%.

Berikut pada Tabel 2, digambarkan tentang pertumbuhan investasi di Sumatera Barat dari tahun 1996 sampai tahun 2006 sebagai berikut:

Tabel 2
Investasi dan Laju pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat
tahun 1994-2008

Tahun	Investasi(dlm juta)	Per(%)
1994	1.816,16	-
1995	2.081,24	14.60
1996	2.094,08	0.62
1997	2.060,91	-1.58
1998	1.770,56	-14.09
1999	1.425,86	-19.47
2000	1.553,00	8.92
2001	1.609,92	3.67
2002	4.878,03	202.99
2003	5.081,43	4.17
2004	4.830,00	-4.95
2005	4.777,13	-1.09
2006	5.007,32	4.82
2007	5.237,90	4.60
2008	5.204,72	-0.63

Sumber: Statistik Sumatera Barat(berbagai edisi) BPS Sumatera Barat tahun 2010

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa pertumbuhan investasi di Sumatera Barat selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 1999, pertumbuhan investasi mengalami penurunan sebesar -19,47% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar -14,09%. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 yang memperburuk perekonomian Sumatera Barat sehingga para investor mengurangi penanaman investasi mereka di Sumatera Barat.

Pada tahun berikutnya pertumbuhan investasi Sumatera Barat berangsur-angsur mulai membaik, walaupun pada tahun 2004 dan 2005 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2000, pertumbuhan investasi Sumatera Barat yang bernilai minus telah meningkat sebesar 8,92%. Angka ini cukup baik dari rata-rata pertumbuhan investasi selama 15 tahun tersebut yang berkisar sebanyak 15,11%.

Pada Tabel 3 ditampilkan data tentang laju pertumbuhan PAD di Sumatera Barat dari tahun 1994-2008 sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah PAD dan Laju Pertumbuhan PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 1998-2008

Tahun	PAD(dlm juta)	Pert(%)
1994	44.926,328	-
1995	56.411,937	25.57
1996	60.360,923	7.00
1997	64.300,420	6.53
1998	43.939,311	-31.67
1999	57.413,821	30.67
2000	85.157,383	48.32
2001	140.763,201	65.30
2002	213.275,546	51.51
2003	281.449,460	31.97
2004	375.074,888	33.27
2005	406.649,236	8.42
2006	494.929,543	21.71
2007	491.315,593	-0.73
2008	636.224,684	29.49

Sumber: Sumatera Barat dalam angka(berbagai edisi) BPS Sumatera Barat tahun 2010

Dari Tabel 3 di bawah ini dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PAD di Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Kadang meningkat dan kadang menurun. Pertumbuhan PAD yang paling besar adalah pada tahun 2001, yaitu

sebesar 65,30%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2000 yaitu sebesar 48,32%.

Pertumbuhan PAD yang paling kecil adalah pada tahun 1998 bernilai negatif yaitu sebesar -31,67%. Hal ini disebabkan karena masih adanya efek krisis moneter sehingga turunnya pendapatan masyarakat sehingga menurunkan PAD Sumatera Barat. Dari 15 tahun tersebut, rata-rata PAD setiap tahunnya adalah sebesar 23,38%. Angka ini masih cukup kecil dalam rangka peningkatan nilai PAD Sumatera Barat.

Keadaan ini terus akan berlangsung hingga investasi dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Dimana pada tahun sebelum krisis, investasi mengalami pertumbuhan yang stabil. Namun puncaknya dapat dirasakan dengan hadirnya krisis moneter yang melahirkan persoalan pelik terutama yang bersangkutan dengan permasalahan pertumbuhan perekonomian. Seharusnya investasi merupakan solusi dari permasalahan ekonomi tapi malah sebaliknya, investasi di Sumatera Barat mengalami penurunan yang drastis sejak terjadinya krisis.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)*.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara

berkembang dengan baik. Dengan membaiknya perekonomian maka tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat karena meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dalam perekonomian suatu daerah, investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan syarat memiliki kecenderungan yang seimbang dalam waktu yang berkesinambungan. Pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang berkembang termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi memiliki dana yang besar, tetapi di sisi lain usaha pengalihan sumber dana daerah untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam pembentukan modal.

Kekurangan modal untuk melakukan investasi merupakan salah satu persoalan utama pembangunan ekonomi di daerah-daerah di Sumatera yang sedang berkembang, tak terkecuali Sumatera Barat. Kekurangan modal ini karena rendahnya tabungan masyarakat, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, serta adanya kebiasaan masyarakat menyimpan kekayaan dalam bentuk emas, perak dan benda berharga lainnya. Akibatnya jumlah tabungan yang ada di lembaga keuangan sangat kecil, sehingga sumber dana untuk melakukan investasi sangat terbatas untuk pembiayaan pembangunan.

Persaingan untuk menarik investor ke Sumatera Barat juga semakin ketat mengingat propinsi-propinsi lain juga sedang melakukan berbagai perbaikan-perbaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena para pengusaha dan investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya apabila

terciptakan iklim yang kondusif. Dalam menghadapi permasalahan tersebut tidak perlu merasa panik karena Sumatera Barat memiliki sumber daya yang tinggi dan potensial untuk menarik Investor.

Dengan banyaknya investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian Sumatera Barat harus tetap mempertahankan dan meningkatkan upaya penciptaan kondisi yang kondusif untuk penanaman modal atau investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan melihat berbagai data, fakta dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan menambah wawasan penulis di bidang penelitian dan tulisan ilmiah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan mengenai pembangunan daerah dengan sumber dana yang terbatas adanya..
3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.
4. Penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya untuk Ilmu Ekonomi Regional Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep dan Teori Pendapatan Asli Daerah

Menurut Wajong (1980:11) pemerintah daerah adalah sebagai suatu rumah tangga yang diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup.

Untuk melihat kemampuan daerah tersebut dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan, dimana keuangan merupakan faktor esensial dalam tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Sehubungan dengan keuangan daerah, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan merupakan salah satu dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Sudirwo (dalam Lains 1985:29) kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya dapat dilihat dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keuangan daerah merupakan suatu bagian atau kegiatan dalam pemerintahan daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan, layanan masyarakat dan keperluan masyarakat lainnya.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan yang terus diupayakan peningkatannya. Upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah tersebut merupakan pencerminan dari usaha daerah dalam membiayai pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Menurut Lains (1985:53) untuk dapat memenuhi keuangan yang memadai dengan sendirinya, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini pemerintah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni:

- a. Pemerintah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah, yang sudah dapat izin dari pemerintah pusat.
- b. Pemerintah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau Bank, atau melalui pemerintah pusat.
- c. Ikut mengambil bagian yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.
- d. Pemerintah daerah dapat menambah tariff sentral tersebut, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
- e. Pemerintah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Menurut Tambunan (2000:201) bahwa tujuan UU. No 22 Tahun 1999 adalah untuk mengubah sistem alokasi anggaran menjadi sistem bagi hasil. Dalam konteks ini, fungsi desentralisasi fiskal merupakan ketetapan peran dan tanggung jawab pemerintah di segala bidang, memfasilitasi transfer bantuan antar pemerintah daerah, memperkuat sistem penerimaan daerah melalui penetapan pelayanan yang lebih baik, memberikan kepastian usaha kepada pihak swasta, dan menjamin keselamatan masyarakat sebagai bagian dari redistribusi pendapatan. UU No. 25 Tahun 1999 dalam konteks ekonomi

Indonesia merupakan peraturan tentang sumber penerimaan daerah dan mengawasi anggaran (*budged*) oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai sumber penganggaran, yaitu yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bantuan transfer dari anggaran pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

Sumber-sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai tugas-tugas otonomi daerah dalam bentuk anggaran daerah. Anggaran daerah meliputi semua sumber pendapatan daerah dan semua pengeluaran daerah untuk suatu tahun anggaran. Anggaran ini merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan, yang terperinci lebih lanjut menurut bagian-bagian pos-pos anggarannya.

Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yang bersumber dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah, seperti penerimaan dari sewa rumah dinas milik pemerintah daerah, hasil penjualan barang bekas milik pemerintah daerah, usaha yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah yang bukan perusahaan daerah untuk menghasilkan jasa yang dipergunakan masyarakat, serta usaha lainnya dari daerah yang sifatnya tidak rutin.

a. Pajak Daerah

Menurut Sumitro (2000:01) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suparmoko (1980:91) pajak disamping sebagai sumber penerimaan negara yang utama atau fungsi budgetair juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat pengatur atau fungsi *Legurelend*. Sebagai fungsi penerimaan, dalam hal ini pajak digunakan sebagai alat mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan sebagai alat pengatur disini dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Menurut Sutrisna (1981:81) pajak adalah iuran yang oleh pengusaha ditentukan secara sepihak dan tidak diimbangi dengan suatu jasa istimewa yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Sumitro (2000:86) pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa balik, sebagai alat pencegah dan pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Sedangkan pengertian dari pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah atau Swatantra seperti Provinsi, Kota, Kabupaten dan sebagainya.

Menurut Siagian (1983:70) merumuskan pajak sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang No. 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pasal 1 ayat 6 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dalam undang-undang no 14 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, maka jenis pajak daerah dapat dibagi atas dua kelompok yaitu:

- a. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi (TK I), yakni:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

- b. Jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota (TK II), adalah:
- 1) Pajak hotel
 - 2) Pajak restoran
 - 3) Pajak hiburan
 - 4) Pajak reklame
 - 5) Pajak penerangan jalan
 - 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - 7) Pajak parkir

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan ekonomi daerah dimasa yang akan datang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Davey (1988:31) dengan peraturan didapatkan pajak lain selain yang telah disebutkan dengan kriteria:

- a. Bersifat pajak bukan retribusi
- b. Objek dan dasar pengeluaran pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Potensi memadai
- d. Tidak memberikan dampak yang negative
- e. Memperlihatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- f. Menjaga kelestarian lingkungan

Menurut Simanjuntak (dalam Halim, 2001:96) dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Indikator keuangan daerah yang berhasil adalah Daya Pajak (Tax Effort)

Daya pajak adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak disuatu daerah. Salah satu indicator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestic Regional Bruto (PDRB).

Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga akan meningkat. Ini mengandung arti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat.

Fungsi pajak

Menurut Brotodiharjo (dalam halim, 2000:145) pajak dilihat dari pemungutanya dilihat dari 2 fungsi:

1. Fungsi Budgeter

Fungsi ini teletak dan lazim dilakukan pada sector public dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat yang dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara atau daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pembangunan pemerintah pusat atau daerah.

2. Fungsi Regulair

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sector keuangan negara atau daerah, konsep ini paling sering digunakan pada sector swasta.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat atau daerah.

b. Retribusi Daerah

Menurut Devas (1988:85) kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berasal pada efisiensi ekonomi. Dalam hal orang perorangan bebas menentukan besarnya layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan dan mengurangi penghamburan. Teori ekonomi mengatakan bahwa harga barang atau layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat hendaknya didasarkan kepada biaya tambahan (*marginal cost*), yakni biaya untuk melayani konsumen terakhir. Tujuannya adalah agar harga yang akan muncul di dalam pasar, ada persaingan bebas.

Undang-undang darurat tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah imbalan jasa yang diterima atas pemakaian atau pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau suatu badan atas pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pungutan ini dikenakan pada kegiatan

yang memperoleh manfaat tertentu. Dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas kegiatan tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Sedangkan UU No. 34 Tahun 2000 dalam pasal 1 dinyatakan bahwa retribusi daerah itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Davey (1988:31) pengertian retribusi secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran itu. Retribusi adalah sumber penerimaan yang sudah umum dan menjadi sumber utama dari pendapatan untuk pembangunan daerah.

Retribusi adalah penerimaan yang diterima oleh pengusaha public dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan dan yang berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diberikan pengusaha kepada kepentingan rumah tangga swasta.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah

- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontra prestasi langsung
- d. Pembayaran retribusi dapat dilaksanakan apabila ada jasa atau aset daerah yang langsung dinikmati oleh penggunaanya.
- e. Pemakaian jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah bisa orang pribadi atau suatu badan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menerapkan prinsip dasar retribusi sehingga dapat menggambarkan hubungan yang nyata antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah ini, maka jenis retribusi daerah dibagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. Retribusi jasa umum

Merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh setiap badan pribadi atau usaha.

Retribusi jasa umum terdiri atas:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi layanan persampahan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
- 4) Retribusi penguburan dan pengabuan
- 5) Retribusi parkir ditepi jalan umum
- 6) Retribusi pasar
- 7) Retribusi air bersih

- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan

b. Retribusi jasa usaha

Merupakan retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi jasa usaha terdiri atas:

- 1) Retribusi penilaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- 3) Retribusi terminal dan tempat parkir khusus
- 4) Retribusi tempat penitipan anak
- 5) Retribusi tempat penginapan
- 6) Retribusi penyedotan kakus
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi tempat pendaratan kapal
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- 10) Retribusi tempat penyeberangan di atas air
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair

c. Retribusi perizinan tertentu

Merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu terdiri atas:

- 1) Retribusi izin peruntukkan penggunaan tanah
- 2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 3) Retribusi izin pengambilan hasil hutan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Dalam penetapan retribusi daerah, haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan
- b. Terdapat kebebasan dalam memilih
- c. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Perusahaan daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan/tau berdasar kan undang-undang. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa disektor industri, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Selanjutnya perusahaan daerah berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu perusahaan daerah yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah yang didirikan untuk tujuan peningkatan PAD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Menurut pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah menyatakan bahwa penerimaan lain-lain adalah salah satu komponen PAD diluar pajak, retribusi, bagian laba BUMD dan penerimaan dinas-dinas. Termasuk kategori penerimaan lain-lain adalah penerimaan dari sewa rumah dinas milik pemerintah daerah, hasil penjualan barang bekas milik pemerintah daerah, usaha yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah yang bukan perusahaan daerah untuk menghasilkan jasa yang dipergunakan masyarakat, serta usaha lainnya dari daerah yang sifatnya tidak rutin. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, beberapa penerimaan lain-lain seperti sewa rumah dinas akan dikelompokkan ke dalam penerimaan retribusi, sehingga penerimaan dari sumber ini dimasa yang akan datang diperkirakan akan semakin berkurang.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Menurut Sukirno (1994:10) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut Budiono (1988:1) pertumbuhan merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang yangmana peningkatan output tersebut dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Kuznets (dalam Jhingan, 1996:72) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi pada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Menurut Nellis dan Parker (dalam Jhingan, 1996:75), pertumbuhan ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kapasitas produktif ekonomi tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB), atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Sukirno (1994:10), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat

meningkat. Sukirno juga menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi jangka panjang. Di setiap periode, suatu masyarakat akan memproduksi barang dan jasa. Ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi yang berlaku. Dalam setiap periode, jumlah tenaga kerja akan bertambah karena ada golongan penduduk yang akan memasuki angkatan kerja. Investasi masa lalu akan menambah barang modal dan kapasitas memproduksi di masa kini. Dalam kajian ini, maka akan dapat menambah jumlah wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat secara tidak langsung.

Menurut BPS (2006), pertumbuhan ekonomi adalah suatu gambaran mengenai dampak pembangunan ekonomi yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam struktur ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun tergambar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan dalam kegiatan perekonomian.

Perubahan nilai PDB akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta Pendapatan Nasional (National Income). Definisi PDB yaitu seluruh nilai

tambah yang dihasilkan oleh berbagai sector atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu domestic atau agregat.

Perhitungan PDB/PDRB dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu:

- a. PDB/PDRB menurut harga berlaku.

Dimana PDB/PDRB dengan faktor inflasi yang masih terkandung di dalamnya.

- b. PDB menurut harga konstan

Dimana PDB/PDRB dengan meniadakan faktor inflasi. Artinya pengaruh harga telah dihilangkan.

3. Investasi

Investasi secara umum berasal dari kata penanaman modal, yang merupakan salah satu komponen untuk menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004:121).

Investasi merupakan pengarah penanaman modal pada seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu yang dimaksudkan dengan mendukung pertumbuhan dan pengembangan perekonomian wilayah tersebut. Pengarahan investasi biasanya mempertimbangkan faktor kebutuhan dan potensi yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian investasi secara langsung diharapkan

akan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara berkesinambungan.

Investasi sering disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam ekonomi makro merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Pengertian investasi secara umum (Sukirno, 2004:121):

”Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.”

Jadi investasi merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan modal. Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditentukan juga oleh besarnya investasi yang dilakukan.

Investasi dalam pertumbuhan ekonomi juga sering diartikan sebagai akumulasi atau pembentukan modal. Akumulasi atau pembentukan modal terjadi apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu. Sedangkan modal diartikan sebagai persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Secara matematis investasi:

$$I = \Delta K$$

Pendapat lainnya tentang pengertian pembentukan modal juga dikemukakan oleh R. Nurkse, dalam bukunya "*Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries*". Menurut Nurkse (dalam Jhingan, 2004:69):

"Arti pembentukan modal ialah bahwa masyarakat tidak menggunakan seluruh aktifitas produksinya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi juga menggunakan sebagian saja untuk pembentukan modal seperti: perkakas dan alat-alat, mesin dan fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya, segala macam bentuk modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif. Inti proses itu dikemudian ialah pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat ke tujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal begitu rupa sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi di masa depan."

Investasi di bidang barang modal juga menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara itu. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal jugalah yang nantinya akan membawa ke arah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi pada gilirannya membawa ke arah spesialisasi dan penghematan dalam produksi skala luas.

Menurut Sukirno (2004:351), bahwa pada dasarnya sumber modal yang dapat dipergunakan untuk pembangunan dibedakan atas:

- a. Pengarahan modal dalam negeri yang berasal dari 3 sumber yaitu tabungan sukarela, tabungan pemerintah dan tabungan swasta.
- b. Pengarahan modal luar negeri, berupa bantuan luar negeri dan penanaman modal asing.

Menurut Sukirno (2004:122) terdapat beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat investasi dalam kegiatan perekonomian. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh
- b. Tingkat suku bunga
- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan
- d. Kemajuan teknologi tingkat pendapatan nasional dan perubahan biaya-biaya.
- e. Keuntungan yang diperoleh perusahaan

Jadi, menurut Sukirno terdapat beberapa faktor yang mendorong terciptanya investasi pada suatu jenis kegiatan antara lain adalah ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan dan juga tingkat kemajuan teknologi.

Menurut Tandelilin (2001:3) investasi adalah komitmen atas sejumlah dari sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang. Dimana sumber dana investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Investasi yang mengurangi konsumsi saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung, yang akhirnya akan diinvestasikan.

Dalam aktivitas perekonomian investasi merupakan faktor penting. Teori klasik menganggap investasi sebagai injeksi yang mempercepat arus perputaran barang dan jasa yang menandakan tingginya tingkat kemakmuran masyarakat.

4. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori model Neo klasik (dalam Arsyad, 1999: 55), pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertumbuhan penyediaan faktor-faktor produksi yaitu: penduduk, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari.

Akumulasi modal sangat besar pengaruhnya terhadap produksi dan pendapatan nasional sebagai dengan pertumbuhan barang modal ini akan dapat meningkatkan dan memperbesar jumlah produksi dan pendapatan nasional dan daerah. Selanjutnya akan memungkinkan pula terciptanya pertambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan produksi berikutnya.

Menurut Sukirno (2004:121) dalam prakteknya usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran – pengeluaran berikut:

- a. pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan mesin lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- b. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya.
- c. Pertambahan stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang-barang yang masih dalam produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga jenis investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam prekonomian dan mengganti barang-barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi dengan nilai depresiasi maka akan dapat investasi netto. Berdasarkan sumbernya, pengerahan modal dapat dibedakan atas: (1) pengerahan modal dalam negeri yang berasal dari tiga sumber yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa, (2) pengerahan modal dari luar negeri, yang berasal dari bantuan luar negeri dan penanaman modal asing.

Dalam aktivitas perekonomian, investasi merupakan faktor penting ekonomi aliran klasik dan neo klasik menganggap investasi sebagai semacam injeksi yang mempercepat arus perputaran barang-barang dan jasa-jasa yang mana percepatan arus komoditi otomatis menandakan tingginya tingkat kemakmuran masyarakat.

Menurut Lepsey, dkk (dalam Jhingan, 1997:97) mengatakan bahwa investasi merupakan:

“Salah satu dari determinan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang pada hakekatnya juga merupakan langkah awal bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi akan menambah sumber daya produktif suatu negara. Investasi juga sering merupakan satu-satunya cara bagi teknologi baru yang produktif untuk meningkatkan kinerja ekonomi, karena investasi harus dibiayai dengan tabungan. Dalam jangka panjang tingkat tabungan suatu negara melalui efeknya pada investasi dapat menimbulkan pengaruh penting pada pertumbuhan ekonomi.”

Teori yang dijelaskan oleh Roy I. Harrod (1984) dan Evsey D. Domar (1975) di Amerika Serikat. Ciri pokok gagasan Harrod-Domar dikenal dengan

Instability Theory yaitu teori ketidakstabilan yang mana terdapat suatu proses pertumbuhan melekat. Suatu factor ketidakstabilan yang menjadi gangguan terhadap equilibrium sehingga konsekuensinya diperlukan langkah-langkah kebijaksanaan tertentu untuk menanggulangi ketidakstabilan guna menjaga pertumbuhan yang berdasarkan equilibrium antara tabungan investasi pendapatan yang stabil dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan ini Harrod (dalam Djojohadikusumo, 1994:38-39) mengemukakan beberapa konsep perihal laju pertumbuhan:

- a. *The warranted rate of growth*, laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap memadai dari sudut pandang para pengusaha calon investor, sehingga para pengusaha akan meneruskan usahanya dengan melakukan investasi secara kontinu.
- b. *The natural rate of growth*, laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan ditentukan oleh kondisi dasar (*fundamental condition*) yang menyangkut bertambahnya kerja, karena kemajuan teknologi. Dimana kondisi dasar ini menjadi batas maksimal bagi laju pertumbuhan produksi dan pendapatan riil.

Harrod Domar (1984:87) memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi, pertama ia menciptakan pendapatan dan yang kedua memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap PAD

Pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi tentang sejauhmana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu tahun dalam menghasilkan

tambahan pendapatan bagi masyarakat. PAD pada dasarnya merupakan salah satu parameter dalam menentukan kemampuan keuangan daerah. Menurut David dalam Amar (2003:103) kinerja keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nisbah antara PAD dengan PDRB. Kemudian lebih lanjut dinyatakan bahwa kinerja PAD tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang tergambar dari angka PDRB adalah refleksi dari aktifitas masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan PDRB. Perkembangan PDRB menurut Simanjuntak (dalam Halim 2004:98) juga menggambarkan kemampuan membayar masyarakat terhadap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pajak daerah dan retribusi). Semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi pula kemampuan membayar pungutan atas pelayan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dan lebih lanjut Saragih (2003:68) menjelaskan bahwa sumber utama PAD adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh intensitas perekonomian daerah yang diindikasikan dari tingkat PDRB suatu daerah. Semakin berkembang kegiatan ekonomi disuatu daerah maka semakin besar potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut. Dengan berkembangnya ekonomi daerah maka akan memberikan kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Lestari (2000:78) dalam penelitiannya mengenai pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD Kota Bukittinggi menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Bukittinggi. Sedangkan koefisien regresi atau elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk kota Bukittinggi bersifat elastis (3,871). Hal ini juga berarti peningkatan PAD relative lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk.

Syafrijal (2008:53) mengenai factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, menemukan bahwa variabel tenaga kerja dan investasi secara bersama-sama mempengaruhi penerimaan PAD sebesar 82,3%, sedangkan sisanya 17,7% merupakan faktor lain di luar model penelitian tersebut.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan penelitian pada pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga akan mendeskripsikan sejauhmana pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Barat.

C. Kerangka Konseptual

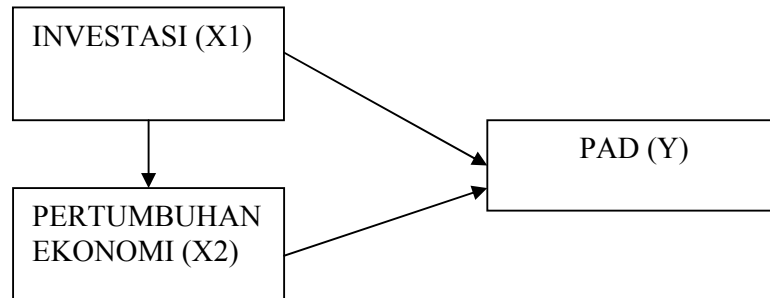
Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah penulis kemukakan, selanjutnya penulis akan merumuskan kerangka konseptual dari penelitian ini. Dimana kerangka konseptual ini akan menggambarkan dan menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel dalam penelitian ini.

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Banyak variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah tingkat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi..

Secara teoritis, investasi akan mempengaruhi jumlah pajak yang diterima oleh suatu negara. Investasi akan timbul karena ada keinginan mendapatkan laba atau keuntungan dari jumlah yang diinvestasikan tersebut. Dalam penelitian ini, jumlah investasi(X_1) akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (X_2), semakin tinggi investasi akan semakin tinggi pulalah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Investasi (X_1) akan mempengaruhi PAD (Y). Pertumbuhan ekonomi (X_2) akan mempengaruhi PAD (Y). Semakin tinggi jumlah investasi maka akan semakin tinggi pulalah tingkat PAD. Dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi jugalah tingkat PAD.

Untuk memperjelas keterkaitan Investasi dan Pertumbuhan ekonomi terhadap PAD dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Koseptual

D. Hipotesis

1. Pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Investasi menurut aliran klasik dan neo klasik merupakan pembentukan modal yang dapat mempercepat arus perputaran barang-barang dan jasa-jasa yang mana percepatan arus tersebut menandakan tingginya kemakmuran masyarakat.

Investasi sangat besar pengaruhnya terhadap produksi dan pendapatan nasional sehingga dengan pertumbuhan barang modal ini akan dapat meningkatkan dan memperbesar jumlah produksi sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan nasional dan daerah. Selanjutnya akan memungkinkan pula terciptanya pertambahan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Dalam aktivitas perekonomian, investasi merupakan faktor penting ekonomi aliran klasik dan neo klasik menganggap investasi sebagai semacam injeksi yang mempercepat arus perekonomian.

Menurut Lepsey, dkk (dalam Jhingan, 1997:97) mengatakan bahwa investasi merupakan salah satu dari determinan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang pada hakekatnya juga merupakan langkah awal bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi akan menambah sumber daya produktif suatu negara. Investasi juga sering merupakan satu-satunya cara bagi teknologi baru yang produktif untuk meningkatkan kinerja ekonomi, karena investasi harus dibiayai dengan tabungan. Dalam jangka panjang tingkat tabungan suatu negara melalui efeknya pada investasi dapat menimbulkan pengaruh penting pada pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi.

Menurut Budiono (1988:1) pertumbuhan merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang yang mana peningkatan

output tersebut dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Sukirno (1994:10), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dengan demikian Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat.

$$H_0 : P_{yx1} : = 0$$

$$H_a : P_{yx1} : \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.

$$H_0 : P_{x1x2} = 0$$

$$H_a : P_{x1x2} \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.

$$H_0 : P_{yx1} : P_{yx2} = 0$$

$$H_a : P_{yx1} : P_{yx2} \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,000$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,905 dengan asumsi *ceteris paribus*. Semakin tinggi jumlah investasi di Sumatera Barat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Sebaliknya semakin rendah jumlah investasi maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sendiri.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat yaitu dengan pengaruh sebesar 17,97%. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat hanya sebagian kecil dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan 82,03% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Investasi dan Pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat (tingkat signifikan masing-masing 0,000 dan 0,000) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,582 dan 0,424. Semakin tinggi jumlah investasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat maka akan semakin tinggi pulalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat. Sebaliknya

semakin rendah tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, maka akan menurunkan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil hipotesis penelitian ini serta simpulan yang di peroleh dari hasil analisis tersebut maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera barat, maka kepada pemerintah daerah disarankan agar lebih bisa menarik para investor baik investor domestik maupun asing agar mau berinvestasi ke Sumatera Barat, yaitu dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempermudah perizinan dalam berinvestasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan stabilnya perekonomian maka para investor tidak takut untuk menginvestasikan modalnya. Dan hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sendiri.
2. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi maka pemerintah diharapkan agar lebih meningkatkan jumlah PDRB dalam rangka meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan cara menambah faktor-faktor ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Sumatera Barat sendiri.

3. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Sumatera barat maka diharapkan Pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain karena dari hasil penelitian bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi hanya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebanyak 74,30%. Hal ini berarti masih banyak variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat yaitu sebanyak 25,70%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2000. *Ekonomi Indonesia Baru*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo
- Badan Pusat Statistik (BPS) : *Statistik Indonesia (berbagai edisi)* Jakarta : BPS
 _____: *Sumatera Barat Dalam Angka (berbagai edisi)*
 Padang : BPS
- Bank Indonesia (BI): *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia berbagai edisi*.
 Padang : Bank Indonesia Sumatera Barat
- Budiono. 1980. *Teori Moneter* : Yogyakarta : BPFE
- _____.1985. *Ekonomi Moneter. Seri Sinopsis, Pengantar Ilmu Ekonomi*.
 Yogyakarta : BPFE
- Davey, KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Negara Dunia Ketiga*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Both, Kenneth Davey, Roy Kelky. 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Penerjemah Masri Mans, Sri Edi Swasono. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar dan Sumarno Zain. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Lestari, Hanna. *Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap PAD Kota Bukittinggi*. Skripsi. FE UNP. Padang
- Mankiew, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat*. Erlangga : Jakarta
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. PT. Gramedia : Jakarta.
- Mubyarto. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi* : BPFE Jakarta